



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSJ MENUR SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUMUN ZURIDA EMILIA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 814462

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 540.000.000

1. Tanah Seluas 429 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS AVANSA Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 564.808.608**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.229.808.608

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.229.808.608

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.